



## DAMPAK PELATIHAN *STAF AD-HOC* TERHADAP HASIL PEMILU DI NEGARA BAGIAN KANO, NIGERIA

Aminu Sani Dutse<sup>1</sup>, Nwamaka P. Ibeme<sup>2</sup>, Mark Ochala<sup>3</sup>, Musa Zakari<sup>4</sup>

Ilmu Manajemen, Universitas Terbuka Nasional, Abuja Nigeria<sup>1234</sup>

e-mail: [nationalopenuniverse.nigeria@gmail.com](mailto:nationalopenuniverse.nigeria@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Staf Ad-hoc terhadap Hasil Pemilu di Negara Bagian Kano, Nigeria”, mengadopsi desain penelitian survei kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian kuesioner terstruktur kepada populasi 300 staf ad-hoc di negara bagian Kano. Penggunaan sumber sekunder mencakup laporan dari INEC tentang pemilihan sebelumnya serta pedoman tentang pelatihan staf ad-hoc). Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan statistik inferensial dan deskriptif yang mencakup Analisis Varians (ANOVA) dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan teknologi berdampak besar pada efisiensi kegiatan Hari Pemilu, dengan nilai-p 0,000. Di sisi lain, durasi pelatihan sebagai variabel independen tidak memengaruhi efisiensi dan akurasi kegiatan pemilu, dengan nilai-p 0,127. Konten pelatihan pra-pemilu sebagai variabel independen ditemukan signifikan secara statistik terhadap akurasi hasil pemilu, dengan nilai-p 0,000. Studi ini menyimpulkan bahwa ketika staf ad-hoc terlatih dengan baik, hasil pemilu yang dihasilkan lebih kredibel, bahkan dengan jumlah pemilih dan penghitungan suara yang lebih realistis. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa pelatihan untuk staf ad-hoc harus ekstensif dan efektif. KPU harus memastikan pelatihan tentang keahlian teknologi serta pelatihan pra-pemilu tentang perilaku dan etika proses pemilu. Selain itu, pelatihan berkala harus dilakukan sebagai bagian dari kursus penyegaran yang bertujuan untuk memastikan kompetensi staf dan pembaruan tentang inovasi dalam proses pemilu.

**Kata Kunci:** *Pelatihan Staf Ad-hoc, Hasil Pemilu, keterampilan teknologi pemilu dan durasi pelatihan.*

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan pelaksanaan hak politik yang mendasar, dan hasilnya memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat secara luas. Badan penyelenggara pemilu (EMB) khususnya penting di negara-negara demokrasi, khususnya karena mereka terlibat dalam reformasi untuk meningkatkan kredibilitas pemilu di seluruh dunia. Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap kredibilitas pemilu adalah profesionalisme staf, khususnya staf ad-hoc yang sering ditugaskan untuk mengelola unit pemungutan suara dan melaksanakan tugas-tugas penting pada Hari Pemilu.

Beberapa penelitian telah menekankan peran program pelatihan dan pengembangan bagi staf pemilu dalam mempromosikan pelaksanaan dan integritas pemilu. Sebuah penelitian tahun 2021 oleh Collier dan Vicente dalam *European Journal of Political Research* menunjukkan bahwa 'kualitas pejabat pemilu merupakan salah satu penentu terpenting keberhasilan badan penyelenggara pemilu dalam dua pengertian: mereka perlu menyelenggarakan pemilu dengan baik dan mereka perlu membangun kepercayaan publik terhadap hasilnya'. Dengan demikian, program pelatihan yang difokuskan pada penyediaan keterampilan yang dibutuhkan staf untuk mengelola proses pemilu yang melibatkan fitur-fitur yang kompleks dan sering kali baru, seperti sistem pendaftaran, peralatan pemungutan suara, penghitungan suara, dan undang-undang pemilu, berperan penting dalam

pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Memang, semakin kompleksnya proses pemilu di banyak negara, yang didukung oleh semakin canggihnya teknologi, seperti penggunaan pemungutan suara elektronik dan pengiriman hasil secara langsung dari daftar pemilih, mesin penomoran, dan sumber-sumber lain, telah meningkatkan kebutuhan akan staf pemilu yang terlatih dengan baik yang dapat mengelola sistem-sistem ini untuk menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan aman.

Badan-badan pemilu di benua itu sering mengeluhkan pendanaan yang tidak memadai dan kapasitas yang terbatas, serta kesulitan logistik. Personel ad-hoc, karyawan yang direkrut dari staf umum untuk bekerja secara eksklusif pada pemilu, sering direkrut secara sementara dan membentuk sejumlah besar staf pemilu di seluruh benua. Bahkan, sebuah studi baru-baru ini tentang kegagalan pemilu di benua itu menemukan bahwa staf ad-hoc merupakan sumber utama kekurangan pemilu.

Atau ambil contoh bahwa petugas pemilu yang terlatih dengan baik cenderung tidak melakukan kesalahan dalam proses pemilu yang dapat menyebabkan perselisihan dan, selanjutnya, kekerasan terkait pemilu, seperti yang ditulis Olukoshi dan Laakso (2020) di 10 negara Afrika yang berbeda: 'Petugas pemilu yang kurang pengalaman dan pelatihan lebih cenderung melakukan kesalahan dalam melaksanakan pemilu.' Pemilu umum 2017 di Kenya tidak terkecuali: ada sejumlah gugatan hukum berdasarkan

penyimpangan di tempat pemungutan suara, banyak di antaranya terkait dengan ketidakmampuan petugas pemilu. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pemilu 2019 di Malawi. Hasilnya digugat karena tuduhan penyimpangan yang terkait dengan petugas pemilu yang tidak terlatih. Mahkamah Agung negara itu akhirnya membatalkan hasil pemilu.

Menyadari tantangan ini, beberapa negara Afrika baru-baru ini telah mengambil langkah untuk memperkuat pelatihan staf pemilu. Di Ghana, misalnya, sejumlah program pelatihan telah dilembagakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk secara sistematis memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada staf ad-hoc tentang cara menangani tantangan di Hari Pemilihan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini telah memperkuat persepsi kredibilitas seputar pemilu, dan meningkatkan tingkat kepercayaan warga negara terhadap pemilu secara keseluruhan.

Di Negara Bagian Kano, Nigeria, staf ad-hoc dipekerjakan untuk mengelola pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional (KPU), khususnya dosen universitas, anggota korps pemuda, dan pegawai negeri sipil. Akibatnya, kurangnya pelatihan dan pengembangan staf ad-hoc yang diberikan di Negara Bagian Kano, Nigeria, telah menjadi topik perdebatan utama.

Seperti yang ditemukan Okonkwo dkk. di Negara Bagian Kano, kelalaian semacam itu telah berulang kali diamati dalam penyelenggaraan

pemilu di Nigeria. Kelalaian tersebut meliputi keterlambatan penghitungan suara, penanganan materi pemilu yang sensitif secara tidak tepat, dan komunikasi yang buruk antara unit pemungutan suara dan badan pemilu pusat. Kelalaian semacam itu juga telah mengikis kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan, dalam beberapa kasus, mengakibatkan kekerasan pascapemilu. Pemilu umum 2019 di Negara Bagian Kano, Nigeria, menuai kecaman atas berbagai penyimpangan, yang sebagian besarnya disebabkan oleh staf ad-hoc yang belum dilatih dengan baik dalam mengelola kegiatan Hari Pemilu.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan adanya peningkatan apresiasi terhadap kebutuhan pelatihan staf ad-hoc di Nigeria. KPU telah memulai reformasi baru yang menunjukkan tingkat komitmen baru terhadap perekrutan dan pelatihan staf. Untuk pemilihan umum 2023, KPU memperkenalkan modul pelatihan baru dalam penggunaan teknologi dalam pemilihan umum, dan modul baru yang berfokus pada etika dan manajemen konflik. Laporan awal menunjukkan bahwa reformasi ini juga mengurangi kecurangan pemilu.

Sangat penting bagi kita untuk secara cermat meneliti dampak pelatihan dan pengembangan staf ad-hoc terhadap keberhasilan pemilu, terutama di negara-negara seperti Nigeria, di mana proses pemilu sering terkontaminasi oleh penyimpangan yang menggagalkan tujuan pemilu. Meskipun KPU telah meningkatkan perekrutan dan pelatihan staf

ad-hoc selama bertahun-tahun, hubungan antara praktik perekrutan dan pelatihan mereka dengan keberhasilan pemilu belum dipelajari secara sistematis. Hubungan antara pelatihan yang efektif dan hasil pemilu dapat memberikan arahan yang berguna untuk reformasi pemilu di masa mendatang.

Mengingat Negara Bagian Kano di Nigeria akan menyelenggarakan pemilu mendatang; studi ini tepat waktu dalam membahas masalah kredibilitas proses pemilu. Penerapan atau tidak penerapan program pelatihan staf ad-hoc sebagai kebijakan berdasarkan temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan administrasi pemilu di Nigeria.

Integritas pemilu merupakan pilar mendasar tata kelola demokrasi, tetapi pemilu di Nigeria dipenuhi oleh berbagai penyimpangan, inefisiensi, dan dugaan kecurangan, yang salah satu faktornya adalah kurangnya staf ad-hoc yang menyelenggarakan pemilu. Para petugas pemilu sementara ini memainkan peran penting dalam proses pemilu, dan peran ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan pelatihan dan pengembangan mereka, yang sangat penting bagi kredibilitas, transparansi, dan penerimaan hasil pemilu. Mengingat peran staf pemilu ad-hoc dalam administrasi pemilu secara umum dan kurangnya perhatian di bidang pelatihan dan pengembangan mereka di Nigeria khususnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan sifat pasti dari dampak

pelatihan dan pengembangan staf pemilu ad-hoc terhadap keberhasilan pemilu di Nigeria.

Salah satu kritik utama terhadap sistem pemilu Nigeria adalah ketidakmampuannya untuk 'melatih staf ad-hoc tentang modalitas hari pemilu, aplikasi dan penggunaan teknologi pemilu, manajemen konflik, dan kepatuhan terhadap undang-undang pemilu'. Sebagian besar penelitian tentang reformasi pemilu di Nigeria berfokus pada gambaran yang lebih besar, seperti peran aktor politik; sangat sedikit yang telah dilakukan untuk melatih staf ad-hoc, yang sering kali tidak siap menghadapi tuntutan pekerjaan. Ada banyak kontradiksi yang dicatat dalam penelitian: sementara beberapa akademisi berpendapat bahwa pelatihan elektoral staf ad-hoc meningkatkan kualitas manajemen pemilu (Ojo, 2020; Eme 2014), yang lain telah mencatat bahwa pelatihan yang buruk terus berdampak negatif pada kredibilitas pemilu (Adeniyi 2021). Hal ini menunjukkan kesenjangan penelitian utama yang memerlukan analisis yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana hasil pemilu dipengaruhi oleh berbagai bidang pelatihan/pengembangan.

Sebagian besar studi dalam domain ini cenderung hanya mengamati dampak kebijakan dan strategi dalam meningkatkan hasil operasional pemilu, tetapi gagal menawarkan uji empiris tentang bagaimana kurangnya pelatihan dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pemilu, penggunaan teknologi pemilu, dan konflik pemilu. Kedua, terdapat kelangkaan kajian tentang

bagaimana pelatihan pemilu dapat memengaruhi persepsi pemilih tentang keadilan pemilu, dan lebih khusus lagi, bagaimana kualitas pelatihan memengaruhi persepsi pemilih tentang keadilan. Meskipun literatur secara halus membahas masalah yang terkait dengan pelatihan, tidak ada yang menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk menilai hubungan ini secara empiris, terutama yang berkaitan dengan pemilu di negara-negara yang sedang demokratis seperti Negara Bagian Kano, Nigeria, di mana masalah seperti kekerasan pascapemilu dan kekecewaan umum tentang proses pemilu sangat lazim. Studi ini didukung oleh asumsi bahwa meningkatnya penggunaan staf ad-hoc pada pemilu, diperburuk oleh reformasi elektoral baru untuk memperdalam penggunaan persyaratan teknologi untuk akreditasi dan transmisi suara, jika tidak dipikirkan dengan baik, dapat menimbulkan masalah lebih lanjut jika manual pelatihan dan pengembangan tidak ditingkatkan secara memadai. Mengatasi kesenjangan ini menjadi lebih penting sekarang daripada sebelumnya, mengingat antusiasme sebagian besar negara berkembang untuk mengadopsi sistem pemungutan suara dan transmisi elektronik. Secara praktis, studi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasi pada hari pemilu, pengurangan kekerasan terkait pemilu, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kontribusi teoritis dapat berasal dari pemahaman yang bernuansa tentang pengembangan sumber daya manusia, menelusuri

perspektif birokrasi, dan wawasan terperinci tentang cara kerja badan pemilu di negara berkembang. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menyelidiki dampak pelatihan staf ad-hoc (pelatihan pra-pemilu, keterampilan teknologi, dan durasi pelatihan) terhadap hasil pemilu Negara Bagian Kano.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi desain survei deskriptif karena mengkuantifikasi temuan survei dari populasi sasaran, dalam konteks hasil pemilu berdasarkan pelatihan staf ad-hoc di Negara Bagian Kano. Memasukkan desain dokumenter ke dalam studi ini memerlukan penggunaan data kualitatif dari sumber sekunder, termasuk laporan resmi, penelitian terdahulu, dan dokumen terkait pemilu. Desain gabungan memberikan informasi numerik yang diperlukan tentang hasil pemilu dan data kuantitatif berdasarkan perspektif statistik, sementara informasi kualitatif dari data terkait praktik pemilu yang tertanam dalam studi disertakan untuk memberikan perspektif holistik. Desain metode campuran ideal karena hasil pemilu terwujud dalam isu-isu yang kompleks dan multifaset.

Populasi terdiri dari peserta yang sadar dan penting yang sangat penting bagi proses pemilu seperti staf ad hoc, petugas elektoral, agen partai, pemantau, dll. Total ukuran populasi untuk studi ini adalah 2.295. Alasan pemilihan populasi ini sangat dibenarkan karena orang-orang ini terlibat langsung dalam proses pemilu, pengalaman, tindakan, dan

pelatihan yang diberikan memiliki dampak langsung pada kualitas proses pemilu dan hasilnya di Negara Bagian Kano. Lebih jauh, populasi ini paling cocok untuk studi ini karena peneliti berurusan dengan orang-orang yang benar-benar melakukan proses pemilu; mereka adalah orang-orang yang paling relevan untuk dinilai guna menentukan bagaimana pelatihan memengaruhi hasil pemilu di Negara Bagian Kano.

Teknik pengambilan sampel acak digunakan untuk memilih responden dari populasi. Hal ini karena pengambilan sampel acak memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, sehingga meminimalkan bias seleksi. Pengambilan sampel berstrata digunakan untuk memastikan bahwa subkelompok tertentu dalam sampel (yaitu, petugas pemilu dan agen partai) terwakili secara proporsional dan penelitian memiliki generalisasi yang lebih baik dengan berbagai kategori pemangku kepentingan.

Alasan untuk pilihan ini adalah bahwa pemangku kepentingan dalam pemilihan umum tidaklah homogen; orang-orang dalam kelompok yang berbeda mungkin terpengaruh secara berbeda oleh pelatihan staf ad-hoc. Pengambilan sampel berstrata membantu menangkap variasi ini. Pengambilan sampel praktis juga terjadi ketika akses bagi peneliti dibatasi pada partisipan tertentu dan peneliti dapat memperoleh data dari responden yang paling mudah tanpa mengorbankan penelitian.

Sampel yang berjumlah 400 responden dihitung melalui penggunaan rumus Taro Yamane yang merupakan rumus statistik yang tepat untuk digunakan ketika sebuah penelitian dilakukan dengan fokus pada populasi besar karena rumus ini berperan sebagai penentu ukuran sampel yang diperlukan agar bermakna secara statistik. Rumus Taro Yamane memungkinkan penentuan ukuran sampel karena rumus ini menyeimbangkan ketepatan dan kepraktisan penelitian yang diperlukan. Dengan sampel yang berjumlah 400 responden, rumus ini memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan terwakili sekaligus memungkinkan wawasan yang kaya dan komprehensif untuk dikumpulkan, namun tetap dapat dikelola dalam kompleksitas cara pengumpulan data.

$$n = \frac{N}{1 + n(e)^2}$$

Di mana:

n = Ukuran Sampel

N = jumlah total populasi

1 adalah konstan

e = asumsi margin kesalahan atau kesalahan yang dapat ditoleransi yang diambil sebesar 5% (0,05)

$$n = \frac{2.295}{(1 + 2.295(0,05)^2)}$$

$$n = \frac{2.295}{(1 + 2.295)(0,0025)}$$

$$n = \frac{2.295}{(1 + 2.295)(0,0025)}$$

$$\frac{2.295}{(6,73)} n = 341$$

Data dikumpulkan melalui kuesioner dan sumber data sekunder. Kuesioner dirancang untuk menangkap informasi tentang kejadian dan sifat

pelatihan ad-hoc serta dampak yang dirasakan pada proses; pelatihan ini diberikan secara langsung dan daring. Hal ini dilakukan untuk memperoleh tingkat respons yang tinggi dan mengakomodasi jadwal peserta. Sumber data sekunder meliputi laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Nasional (KPU), laporan pengamatan pemilu, dan literatur akademis sebelumnya, yang digunakan untuk menguatkan data primer.

Dua teknik analisis utama yang digunakan adalah analisis statistik dan analisis tematik. Dengan menggunakan perangkat statistik seperti analisis regresi, kami meneliti dampak kualitas pelatihan staf ad-hoc terhadap hasil pemilu. Kami dapat menentukan angka dampak pelatihan terhadap metrik pemilu yang penting seperti partisipasi pemilih, akurasi dalam penghitungan hasil, dan kekerasan pemilu. Dengan menggunakan teknik analisis tematik, kami menganalisis data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber sekunder untuk mengungkap tema dan pola praktik pemilu, tantangan, dan efektivitas pelatihan.

Dengan menggabungkan teknik-teknik ini, kita tidak hanya dapat memahami konteks (melalui analisis tematik), tetapi juga menguji hubungan antara berbagai fenomena (melalui analisis statistik), untuk memastikan bahwa kausalitas dan generalisasi temuan-temuan studi juga masuk akal. Spesifikasi Model untuk penelitian ini adalah:

$$X2 = CDV = \beta_0 + \beta_1 EFA + \beta_2 CHI + \beta_3 ADP + \beta_4 HUM + \beta_5 WEP + \mu_t$$

Model regresi ditentukan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon Y$$

Y mewakili hasil (kinerja).

$X_1, X_2, \dots, X_n$  adalah variabel bebas

$X_1$  = Pelatihan pra-pemilu bagi staf ad-hoc

$X_2$  = Keterampilan teknologi

$X_3$  = durasi program pelatihan

$\beta_0$  merupakan intersep, dan  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  merupakan koefisien variabel independen.

$\epsilon$  adalah suku kesalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif			
	Berarti	Deviasi Standar	N
Pelatihan pra-pemilu bagi staf ad-hoc dan efektivitas pendaftaran pemilih	2.5110	1.13230	319
Keterampilan teknologi yang diperoleh oleh staf ad-hoc dan efisiensi perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi pada hari pemilihan	2.8934	1.28657	319
Durasi program pelatihan dan kinerja staf ad-hoc dalam operasi manajemen pemilu	2.1505	1.15303	319
pelatihan staf ad-hoc (pelatihan pra-pemilu, keterampilan teknologi, dan durasi pelatihan) dan hasil pemilu Negara Bagian Kano, Nigeria	2.5110	1.28576	319

Sumber: Hasil Olahan Data

Statistik deskriptif memberikan wawasan tentang respons terhadap pelatihan pra-pemilu bagi staf ad-hoc untuk meningkatkan efisiensi pemilu dan dampaknya terhadap hasil pemilu di Negara Bagian Kano, Nigeria.

Skor rata-rata untuk pelatihan pra-pemilu bagi staf ad-hoc dan efisiensi elektoral dalam studi ini adalah 2,5110, dengan deviasi standar sebesar 1,13230, yang merupakan skor sedang untuk

persepsi efektivitas program pelatihan pra-pemilu dalam meningkatkan efisiensi elektoral dengan beberapa tingkat variasi dalam respons (RESPONSE V6\_MEAN 2,5110, RESPONSE V6\_STD Dev 1,13230).

Keterampilan teknologi yang diperoleh staf ad-hoc dan pengaruhnya terhadap efisiensi pegawai elektronik dalam mengelola operasi hari pemilihan memiliki skor rata-rata yang sedikit lebih tinggi, yaitu 2,8934, tetapi deviasi standar yang lebih besar, yaitu 1,28657, yang menunjukkan spektrum respons yang luas. Ini menunjukkan bahwa tidak semua responden memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana keterampilan teknologi yang diperoleh staf ad-hoc akan memengaruhi efisiensi gawai elektronik dalam mengelola operasi hari pemilihan (RESPONS V9\_MEAN 2,8934, RESPONS V9\_STD Dev 1,28657).

Durasi program pelatihan dan dampaknya terhadap kinerja staf ad-hoc dalam operasi manajemen pemilu memiliki skor rata-rata 2,1505, dengan deviasi standar 1,15303, yang menunjukkan kurangnya efektivitas dalam durasi program pelatihan tetapi juga pandangan yang konsisten terhadap tanggapan pada skala Likert 5 poin di antara 319 responden.

Secara keseluruhan, penggabungan skor rata-rata untuk pelatihan staf ad-hoc: pelatihan pra-pemilu, keterampilan teknologi, dan durasi program pelatihan; karena terkait dengan hasil pemilu di Negara Bagian Kano menunjukkan persepsi yang

sederhana dengan skor rata-rata 2,5110 dan deviasi standar 1,28576.

Analisis Korelasi Variabel Pelatihan Ad-hoc (Pelatihan Staf Pra-pemilu, Akuisisi Keterampilan Teknologi dan Durasi) dengan Hasil Pemilu di Negara Bagian Kano (Nigeria). Tabel tersebut mengungkapkan bahwa pelatihan pra-pemilu staf ad-hoc ditemukan memiliki korelasi positif, kuat, dan signifikan dengan hasil pemilu ( $r = .550$ ,  $p < .001$ ). Ini berarti bahwa ketika pelatihan pra-pemilu staf ad-hoc baik, akan ada pendaftaran pemilih yang baik yang akan mengarah pada hasil pemilu yang baik. Di sisi lain, akuisisi keterampilan teknologi oleh staf ad-hoc ditemukan memiliki korelasi yang lemah, negatif, dan signifikan dengan efisiensi gadget elektronik yang digunakan pada Hari Pemilihan ( $r = .564$ ,  $p = .000$ ). Ini berarti bahwa keterampilan teknologi kebetulan memengaruhi operasi pemilu yang efisien. Lebih jauh, ditemukan bahwa durasi program pelatihan berkorelasi lemah dan negatif dengan kinerja staf ad-hoc dalam pengelolaan operasi pemilu ( $r = -.024$ ,  $p = .332$ ). Ini menyiratkan bahwa peningkatan pelatihan tidak selalu menghasilkan kinerja staf yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa struktur dan konten pelatihan staf ad-hoc, khususnya pelatihan pra-pemilu, perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil pemilu di Nigeria.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi staf ad-hoc yang dilatih mengenai proses pemilihan umum dan kode etik berkontribusi pada peningkatan akurasi penghitungan suara dan

penurunan insiden kecurangan pemilu. Hal ini memberikan bukti bahwa frekuensi kursus penyegaran dan pelatihan lanjutan secara signifikan memengaruhi kredibilitas hasil pemilu. Studi ini menyimpulkan bahwa program pelatihan staf ad-hoc merupakan faktor penting untuk memastikan hasil pemilu yang efektif, efisien, dan kredibel di Negara Bagian Kano, Nigeria.

Studi ini juga mengungkap pentingnya pelatihan staf ad-hoc dalam prosedur teknologi pemilu guna meningkatkan pelaksanaan proses pemilu yang efektif; durasi pelatihan dan konten pelatihan sangat penting dalam kinerja mereka. Temuan ini sejalan dengan studi empiris oleh Adebayo (2022) dan Okonjo (2021) yang mengamati bahwa konten dan kualitas proses pelatihan, terutama sebelum periode pemilu, memiliki efek yang lebih besar pada hasil pemilu daripada durasi pelatihan atau perolehan keterampilan teknologi oleh staf pemilu.

Temuan ini memiliki implikasi untuk program pelatihan pra-pemilu yang baik menuju proses pemilu yang efektif.

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyatakan bahwa program pelatihan harus terstruktur dan dirancang untuk mempersiapkan staf ad-hoc secara memadai untuk menghasilkan hasil pemilu yang efisien, akurat, dan kredibel di Negara Bagian Kano, Nigeria. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jika staf ad-hoc menerima

pelatihan yang efektif, khususnya tentang penggunaan teknologi dan proses pemilu yang tepat, pelatihan tersebut akan membekali mereka dengan baik untuk mengoordinasikan dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu dan mengurangi kesalahan dalam pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan hasil. Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa pelatihan pra-pemilu bagi staf memastikan bahwa mereka lebih terinformasi dan yakin tentang apa yang harus dilakukan, yang pada akhirnya mengarah pada pemilu yang kredibel dan transparan.

Di antara hal-hal lain, disarankan agar KPU, sebagai kebijakan, menyediakan program pelatihan komprehensif, khususnya tentang penggunaan teknologi dan prosedur pemilu, bagi staf ad-hoc. Selain itu, pelatihan harus diperluas untuk mencakup kursus penyegaran berkala agar staf tetap mendapatkan informasi terkini tentang inovasi pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, K. (2020). *Teknologi dalam Pemilu: Peran Pelatihan dan Kesiapsiagaan*. New York: International Election Studies.
- Olofin, T. (2021). *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu di Afrika*. Lagos: Lembaga Penelitian Demokrasi dan Tata Kelola.
- Smith, J., & Tano, P. (2019). *Mengelola Sistem Pemilu: Buku Pegangan bagi Pejabat Pemilu*. London: Electoral Governance Press.
- Musa, Z., Audi, AA, & Salisu, II (2022). *Peran Pengamat Uni Afrika (AU) dalam Manajemen Pemilu yang Kredibel di Afrika: Pengalaman*

Nigeria (Desember 2022). Tersedia di SSRN:<https://ssrn.com/abstract=4686637> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4686637>

Artikel dari situs web dengan Nama Penulis

Audi, AA, Ibrahim, IS, & Musa, Z. (2019). Peran pemantau pemilu ECOWAS dalam penyelenggaraan pemilu presiden 2015 dan 2019 yang bebas, adil, dan damai di Nigeria. Diperoleh dari <https://keffi.nasuk.edu.ng/handle/20.500.14448/2426>

Blishchuk, K. (2023). Pendekatan modern untuk pelatihan spesialis ruang publik. *Tata Kelola Demokratis*. <https://doi.org/10.23939/dg2023.01.129>

#### **Jurnal:**

Adedeji, O. (2020). Pelatihan pemilu untuk transparansi: Sebuah tinjauan. *Electoral Studies*, 35(2), 45-56.

Adeniyi, A., & Gbadamosi, S. (2021). Reformasi Pemilu dan Peran Staf Ad-hoc dalam Pemilu Negara Bagian Kano, Nigeria. *Jurnal Pemilu Afrika*, 20(2), 102-117.

Ajayi, K. (2018). Staf ad-hoc dalam pemilu: Menjembatani kesenjangan. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 20(3), 67-81.

Brandariz, SP, & Bernardo, R. (2019). Populasi pelatihan umum yang kecil dan ad hoc versus besar untuk seleksi genomik pada persilangan biparental jagung. *Genetika Teoretis dan Terapan*, 132, 347-353.

Chen, S., Andrejczuk, E., Cao, Z., & Zhang, J. (2020). AATEAM: Mencapai Kerja Sama Tim Ad Hoc dengan Menggunakan Mekanisme Perhatian. *Prosiding Konferensi AAAI tentang Kecerdasan Buatan*, 7095-7102.

Chima, O. (2021). Kepercayaan pada Lembaga Pemilu: Pentingnya Pelatihan Pra-Pemilu. *Jurnal Tata Kelola Demokrasi*.

Collier, P., & Vicente, P. (2021). Pemilu dan Pembangunan: Peran Kompetensi Staf Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik*.

Eme, OI, & Onyishi, T. (2014). Tantangan Manajemen Pemilu di Negara Bagian Kano, Nigeria: Peran KPU. *Jurnal Ilmu Sosial Mediterania*, 5(27), 242-251.

Ibrahim, A. (2021). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui pelatihan pemilu. *Jurnal Tata Kelola*, 42(1), 23-36.

Kano, M. (2021). Mempersiapkan petugas pemilu: Tinjauan kritis. *Electoral Process Review*, 14(4), 101-115.

Kerdnoonwong, S. (2018). Model Pelatihan untuk Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Organisasi Pemerintah. *Jurnal Internasional Teknik & Teknologi*, 7(4.38), 984-987.

Khan, S. (2019). Mengurangi Kecurangan Pemilu melalui Pelatihan: Sebuah Studi Komparatif. *Studi Pemilu Global*.

Mensah, P., & Adeyemi, T. (2020). Integritas Pemilu dan Peran Pelatihan. *Tinjauan Demokrasi dan Tata Kelola*.

Nelson, K., McQuillan, S., Gingerich, A., & Regehr, G. (2023). Residen sebagai pengawas: Bagaimana residen senior membuat keputusan penugasan sementara. *Pendidikan Kedokteran*, 57, 723-731.

Obaro, P. (2019). Peran pelatihan pemilu dalam mempromosikan integritas elektoral. *Jurnal Proses Demokrasi*, 11(1), 10-25.

Obi, A., & Aina, M. (2020). Kerangka Hukum dan Pelatihan Pemilu di Afrika. *Jurnal Studi Politik Afrika*.

Ojo, E. (2020). Pemilu dan Demokrasi di Negara Bagian Kano, Nigeria: Peran Personel Pemilu.

Jurnal Tata Kelola dan Pembangunan Afrika, 9(1), 56-70.

Olukoshi, A., & Laakso, L. (2020). Pemilu di Afrika: Tantangan Administrasi Pemilu dan Peran Staf Pemilu. *Tinjauan Tata Kelola Afrika*.

Salami, A. (2019). Teknologi pemilu dan pelatihan resmi. *Inovasi Pemilu*, 22(5), 88-93.

Salim, Adilu Mussa. (2022). Sebuah Studi tentang Efektivitas Pelatihan dan Kinerja Staf Akademik di Institusi Pendidikan Tinggi di Zanzibar. *Jurnal Riset Asia Seni & Ilmu Sosial*, 18(2), 26-43.

Umar, MB, Yahaya, AS, & Musa, Z. (2018). Dampak Kecurangan Pemilu terhadap Demokrasi Berkelanjutan dan Keamanan Nasional di Nigeria. *Jurnal Riset Langsung Ilmu Sosial dan Studi Pendidikan (DRJSSES)*, 5(10), 23-30.

Zakari, K. (2022). Manajemen Pemilu dan Kesiapan Pra-Pemilu. *Jurnal Studi Pemilu*.

Zakari, M. (2022). Pentingnya pelatihan staf ad-hoc dalam pemilu. *Jurnal Manajemen Pemilu*, 30(2), 34-49.